

Ekonomi politik media : inefisiensi media terkontrol kekuatan politik dalam pemilihan umum

Ersina Shinta Baskara
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
ersinashinta.2022@student.uny.ac.id

Abstrak

Media memiliki peran sentral dalam ekonomi politik, menciptakan hubungan kompleks antara kekuasaan politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Makalah ini menguraikan landasan sejarah dan perkembangan ekonomi politik media serta mempertimbangkan epistemologi bidang ini. Perusahaan media, terutama dalam dua dekade terakhir, mengalami pertumbuhan pesat baik di tingkat nasional maupun internasional. Globalisasi neoliberal, finansialisasi ekonomi global, dan kemerosotan ekonomi mempengaruhi tren di berbagai sektor media dan ICT. Makalah ini membahas risiko "government failure" yang mungkin terjadi ketika pemerintah terlalu mengintervensi perekonomian dan media. Studi literatur mendukung gagasan bahwa keberhasilan pemerintah dapat menjadi inefisiensi jika kontrol pemerintah terlalu dominan. Analisis teori ekonomi politik dan konsep "government failure" oleh Le Grand memberikan pandangan lebih lanjut tentang dampak intervensi pemerintah pada efisiensi pasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk penelitian terdahulu, teori ekonomi dan politik, berita, dan media massa. Dari hasil analisis teori, terdapat indikasi bahwa media dapat digunakan sebagai alat ekonomi politik oleh pihak tertentu, sementara intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menyebabkan inefisiensi pasar. Kesimpulannya, media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk pandangan masyarakat dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi politik tertentu. Sementara itu, intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengarah pada "government failure" dan inefisiensi pasar. Studi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas hubungan antara media, politik, dan ekonomi dalam konteks global dan nasional.

Kata kunci: ekonomi politik, media, government failure, Pemilu

Abstract

The media has a central role in the political economy, creating a complex relationship between political power, economics, and information technology. This paper outlines the historical foundations and development of the political economy of the media and considers the epistemology of this field. Media companies, especially in the last two decades, have experienced rapid growth both at the national and international levels. Neoliberal globalization, global economic financialization, and economic downturn are influencing trends in various media and ICT sectors. This paper discusses the risk of "government failure" that may occur when the government intervenes too much in the economy and the media. Literature studies support the idea that government success can become inefficiency if government control is too dominant. Le Grand's analysis of political economy theory and the concept of "government failure" provides further insights into the impact of government intervention on market efficiency. This study uses literature analysis methods from various sources, including previous research, economic and political theory, news, and mass media. From the results of the theoretical analysis, there are indications that the media can be used as a tool of political economy by certain parties, while excessive government intervention can cause market inefficiency. In conclusion, the media not only reflects reality, but also shapes people's views and can be used to achieve certain political and economic goals. Meanwhile, excessive government intervention can lead to "government failure" and market inefficiency. This study provides insight into the complexity of the relationship between media, politics, and economics in a global and national context.

Keywords: political economy, media, government failure, elections

A. PENDAHULUAN

Jurnalisme, periklanan, penyiaran, serta teknologi informasi dan komunikasi hanyalah beberapa dari sekian banyak aspek ekonomi politik media. Pendekatan ekonomi politik menyelidiki hubungan kekuasaan antara isu-isu pemerintahan, perantara, dan masalah keuangan. Untuk memulainya, terdapat kebutuhan untuk membedakan sejarah ilmiah bidang ini, dengan memusatkan perhatian pada landasan dan perkembangan ekonomi politik media sebagai bidang skolastik. Kedua, pembahasan epistemologi bidang ini dengan menekankan beberapa kualitas penting yang membedakannya dari berbagai metodologi dalam penelitian media dan korespondensi. Ketiga, diperlukan pemahaman tentang pedoman yang mempengaruhi kemajuan data dan korespondensi (TIK) atau mungkin iklim korespondensi yang didorong oleh media yang terkomputerisasi, khususnya diagram titik awal penyelidikan ekonomi politik terhadap media dalam industri gaya hidup. Secara khusus, bagaimana cara para analis bisnis politik menciptakan dan melibatkan ekonomi politik dalam media yang terkomputerisasi dan lingkungan media baru yang didorong oleh kemajuan bertahap dalam tiga bidang baru yaitu tahap lanjutan, informasi besar, dan pekerjaan tingkat lanjut. Bidang-bidang ini penting untuk penelitian, bukan hanya karena keduanya saling terkait, namun juga karena bidang-bidang tersebut telah berkembang menjadi komponen kapitalisme modern yang sangat besar dan penting.

Perusahaan media mungkin merupakan tanah yang paling unik dan berkembang pesat dalam ekonomi, di dalam negeri maupun internasional, selama dua puluh tahun terakhir. Di sisi lain, negara-negara maju juga mengalami tren-tren baru yang signifikan, seperti finansialisasi ekonomi global, serta dampak dari proses-proses yang tidak stabil tersebut, terutama berbagai kemerosotan ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 1990an. Pola lintas sektoral ini, pada awalnya, didorong oleh tipe globalisasi neoliberal dan peningkatan minat modal yang berbahaya semua bidang bisnis media dan ICT. Peningkatan cepat

dari tingkat lanjut inovasi, termasuk web dan internet. Disisi lain, jaman telah mendorong perkembangan pesat usaha-usaha ini, sementara pemerintah juga telah memajukan pemasaran media baru dan lama melalui, aktivitas keuangan seperti pembiayaan, merger, dan akuisisi antar perusahaan media. Dampak selanjutnya adalah, pada dasarnya, hingga terjadinya krisis keuangan yang dimulai sekitar tahun 2007/8, perbaikan pesat dalam perusahaan media dan TIK dan pergeseran dari struktur perusahaan swasta modern yang terbuka (*go public*) menjadi perusahaan tertutup terutama di Amerika Serikat Lintasan perkembangan juga dipengaruhi oleh bangkitnya konglomerat media besar-besaran pada akhir tahun 1990an di Amerika Serikat.

Pada masa modern media memiliki peranan yang sangat penting. Peran yang dimaksud bukanlah sekedar penyampaian informasi dan hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tidak bisa dipungkiri, tiap pihak akan berusaha untuk mendapatkan tujuannya masing-masing. Dalam konteks ini, media dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tertentu sehingga perilaku ekonomi politik dapat tercapai. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat sekalipun pemilik perusahaan media memiliki afiliasi dengan gerakan politik tertentu. Perilaku ini dapat berasal dari pihak media mendukung pihak atau pemikiran politik tertentu, atau sebaliknya pihak yang memiliki pengaruh di media turut menjadi bagian dari golongan politik tertentu. Di Indonesia, Direktur Utama PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV) Bapak Surya Paloh merupakan ketua umum dari Partai Nasional Demokrat. Hal ini menyebabkan munculnya isu di masyarakat dimana apa yang dibawakan oleh Metro TV memiliki kecenderungan untuk memihak golongan tertentu ataupun menggiring opini masyarakat ke arah tertentu. Dalam konteks ini Partai Nasdem memiliki kemampuan untuk menggiring opini masyarakat. Saat ini Partai Nasdem mengusung Calon Presiden Bapak Anies Baswedan.

Disisi lain, yang mana jauh lebih berbahaya, terdapat perusahaan media yang

saat ini memiliki kekuatan di pemerintahan. Contohnya Viva group (ANTV, TV One) yang dipimpin oleh Bakrie Group. Bapak Aburizal Bakrie, merupakan mantan Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) yang selama pemerintahan Presiden Jokowi berada di dalam pemerintahan dengan memiliki beberapa perwakilan menteri. Tetapi secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan umum selanjutnya. Disisi lain, pemimpin MNC Group, Bapak Hary Tanoe, sekaligus pemimpin Partai Perindo memutuskan untuk mendukung pemerintahan saat ini. Dapat disadari, saat ini tiap media besar telah memiliki intensitas politik masing-masing.

Makalah ini akan membahas bagaimana media dapat digunakan untuk menjadi media ekonomi politik pada pihak tertentu. Disisi lain, juga akan dipaparkan bagaimana terdapat risiko *government failure*. Kondisi dimana perekonomian akan menjadi efisien jika sebenarnya pemerintahan terlalu mengintervensi perekonomian termasuk perusahaan. Lebih lanjut lagi, jika pemerintahan mengontrol media maka inefisiensi pasar akan terjadi yang menyebabkan kondisi optimal bagi semua pihak.

B. TEORI

1. *Political Economy, Power, and Media* (Mansel 2004)

Ada kecenderungan yang sangat signifikan dalam investigasi terhadap media baru untuk menekankan melimpahnya dan bermacam-macam item dan administrasi media baru dan untuk fokus dalam memajukan akses tanpa memperhatikan desain dan siklus terkait kekuatan yang ditanamkan pada kekuatan politik. Cakupan dan skala pasokan media baru, serta pengaruh teknologi dan layanan digital terhadap kehidupan kita, tidak dapat disangkal sedang mengalami perubahan signifikan. Bagaimanapun, ada proses untuk membuktikan kekurangan dari koneksi ke pembuatan dan pemanfaatan media baru. Keadaan kekurangan ini adalah diciptakan kembali karena penjelasan kekuatan yang berbeda. Dalam masyarakat yang disebut

sebagai masyarakat “informasi” atau “pengetahuan”, artikulasi-artikulasi ini bukannya tidak berarti; sebaliknya, hal ini membantu menjaga kesenjangan yang sudah mengakar antar masyarakat. Perpaduan komitmen masa lalu dan saat ini terhadap ekonomi politik media dan simpang susun bisa dibuat oleh banyak pihak. Termasuk mereka yang memiliki kepentingan politik. Namun, pada intinya terdapat kepentingan untuk mengkaji kondisi historis spesifik di mana produk dan layanan media dan komunikasi baru diproduksi di bawah kapitalisme, serta dampak dari kondisi ini terhadap konsumsinya. Dallas Smythe, yang merupakan pendukung penting ujian awal dalam praktik ini, menggaris bawahi penelitian pada semua bagian dari "proses kekuasaan dalam masyarakat". Dia fokus pada permodalan, organisasi, dan kontrol di industri media dan komunikasi, serta produksi, kualitas, dan alokasi. Padahal konsentrasi dalam kebiasaan ini kerap dikritik karena terlalu dikhawatirkan desain ciptaan bukan dengan isi, makna dan keterwakilannya, Penelitian sebelumnya tidak mengabaikan peluang perlindungan dari kondisi yang ada pola dalam penciptaan media dan korespondensi melalui prosedur elektif pemanfaatan.

2. *Government Failure (Le Grand)*

Ada berbagai penjelasan yang melatar belakangi anggapan bahwa pengaturan administrasi akan mubazir. Pertama, penyedia layanan pemerintah biasanya bersifat monopoli, namun tidak selalu; yang pasti status sindikasi mereka sesekali dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, pasar mereka tidak dapat “diperebutkan”. Artinya, mereka tidak hanya tidak menghadapi persaingan nyata, namun mereka juga terlindung dari potensi persaingan yang mungkin timbul akibat masuknya bisnis baru ke pasar. Juga, cara sindikasi tersebut dimiliki oleh pemerintah bermaksud bahwa, sama sekali tidak seperti sindikasi rahasia, tidak ada kewajiban manajemen untuk menjawab pertanyaan pemegang saham dan tidak ada ancaman

pengambilalihan jika tidak efektif. Kurangnya persaingan, baik yang asli atau yang dikompromikan, dan risikonya mendominasi, mengurangi kekuatan motivasi untuk mengecilkan biaya. Oleh karena itu, akan terjadi ketidakefisienan X dalam keadaan seperti ini.

Dengan kata lain, biaya minimum yang layak secara teknis biasanya lebih rendah dibandingkan biaya penyediaan pemerintah. Namun, para pengelola monopoli pemerintah tidak sepenuhnya kebal terhadap tekanan efisiensi. Dengan asumsi kekecewaan produktivitas sangat drastis, matic, hal ini mungkin akan menambah pemecatan bos politik mereka dari jabatannya, atau sebaliknya pelayanan yang bersangkutan bisa saja 'diambil alih' oleh orang lain dari pengelola management yang bersangkutan. Bagaimanapun, 'kontes stabilitas' politik ini mungkin tidak akan terjadi keberhasilan suatu keharusan sebagai kontek stabilitas pasar. Tidak hanya perubahan pastoral saja lebih jauh lagi, keputusan-keputusan tidak konsisten, namun hasilnya tergantung pada sejumlah besar elemen yang sangat otonom terhadap efektivitas kegiatan pemerintah. Pemasok pemerintah tidak harus berupa sindikasi. Mengikuti perubahan pasar dalam atau 'semi' yang sedang berlangsung dalam sistem sekolah bahasa Inggris, misalnya, model sekolah negeri perlu bersaing untuk mendapatkan siswa. Penerapan perubahan semi pasar serupa di Administrasi Kesejahteraan Masyarakat akan terjadi di klinik milik pemerintah mencari pasien dengan swasta atau di sisi lain klinik yang disengaja. Fasilitas perumahan pemerintah daerah harus bersaing dengan fasilitas perumahan swasta untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah daerah sendiri sebagai akibat dari usulan reformasi layanan masyarakat.

Dampak persaingan antara penyedia layanan pemerintah terhadap efisiensi sebagian akan bergantung

pada organisasi yang bersaing dengan mereka. Jika pesaing yang berbeda mempunyai tujuan utama untuk memperbesar keuntungan mereka, maka tanpa sponsor administrasi apa pun, pemasok otoritas publik yang bersangkutan akan meninggalkan bisnis kecuali jika hal itu membatasi biaya. Jika demikian, sekali lagi, itu pesaing potensial bukanlah pemaksimal manfaat dasar (seperti yang mungkin terjadi). kalau memang disengaja perkumpulan misalnya), tinggal koordinasi saja cara mereka berperilaku untuk bertahan hidup. Terdapat juga ketidakefisienan X karena biaya sementara akan lebih besar dibandingkan biaya sosial aktual.

C. METODE

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis pada studi literatur yang ada. Informasi tersebut akan peneliti sintesakan sehingga menjadi pemaparan yang kokoh. Informasi yang akan peneliti kumpulkan akan berasal dari Indonesia, maupun luar negeri. Bentuk informasi yang peneliti gunakan antara lain:

1. Penelitian Terdahulu
2. Teori Ekonomi dan Politik
3. Berita
4. Media Massa

D. HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil analisa teori terdahulu, ditemukan kesimpulan bagaimana pemerintahan sebaiknya tidak mengintervensi perekonomian jika memang tidak diperlukan. Sebagai bagian dari Pemerintahan, Viva Group, yang dimiliki oleh mantan pemimpin partai pemerintahan dalam konteks ini Partai Golongan Karya, memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan keadaan. Lebih lanjut lagi, jika hipotesis terbukti benar, bahwa terdapat kecenderungan Viva Group menggiring opini dalam bentuk media untuk mendukung pemerintahan, maka bukan tidak mungkin terjadi kondisi *government failure*. Kondisi di mana barang dan jasa yang ada di perekonomian tidaklah efisien. Lebih lanjut lagi, masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan media yang berkualitas tinggi, akan terjadi kebalikannya

dimana media yang dinikmati oleh masyarakat tidak normatif maupun akurat. Tetapi di sisi lain, Metro TV, yang dipimpin oleh pemimpin Partai Nasional Demokrat juga diyakini melakukan cara yang sama. Partai Nasional Demokrat memutuskan untuk menjadi oposisi pemerintahan dimana mengusung calon Presiden Anies Baswedan. Hal yang memparah keadaan, MNC Group, yang dipimpin Harry Tanoe, berada di dalam Koalisi pemerintahan. Hal inilah yang ditakutkan akan menghasilkan *government failure*.

Lewat teori sebelumnya dari Mansel, Industri media memiliki pengaruh yang cukup kuat dikarenakan perkembangan yang luar biasa cepat dan mampu mencakup masyarakat luas. Hal ini memperparah kondisi yang ada. Maka ditakutkan dengan kemampuan media tersebut yang dapat mempengaruhi ekonomi politik, akan terjadi chaos dimana tidak terdapat suatu pihak pun yang dapat menawarkan produk (dalam konteks ini adalah produk media siaran maupun massa) yang tepat, efektif, optimal dan efisien. Jika kondisi ini terjadi, bukan hanya terjadi *government failure* tetapi akan terjadi kegagalan keseluruhan pada industri media massa Indonesia.

E. KESIMPULAN

Media telah berkembang bukan hanya di Indonesia tetapi termasuk negara-negara besar di dunia termasuk Amerika Serikat. Media memiliki kekuatan dalam ekonomi politik sebagai media yang memiliki cakupan sangat luas dan menyeluruh bahkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Saat ini, di Indonesia media massa sudah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Bagaimana tidak, 3 media terbesar dikuasai oleh ketua dan mantan ketua partai. Pada pemilihan umum mendatang tiap grup dari masing-masing 3 perusahaan memiliki calon presiden yang di dukung juga. Pada pembahasan ini, dipaparkan berbagai teori dimana bagaimana kemampuan media. Disisi lain juga dibahas bagaimana dapat terjadi *government failure* maupun *economic failure* pada Industri media.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Le Grand, J., 1991. The theory of government failure. *British journal of political science*, 21(4), pp.423-442.
- Mansell, R., 2004. Political economy, power and new media. *New media & society*, 6(1), pp.96- 105.
- Mansell, R., 2009. The power of new media networks. *Media/Cultural Studies: Critical Approaches*. New York: Peter Lang, pp.107-122.